2021

PEMERINTAH
KABUPATEN KUDUS

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Tahun 2021

BPBD
KABUPATEN KUDUS

Alamat : Jalan PG. Rendeng Mlatinorowito Kudus
Kode Pos 59319 Telepon / Fax (0291) 4250022
Email : bpbdkudus_jateng@yahoo.com
website : bpbd.kuduskab.go.id

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
KATA PENGANTAR iv

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Kedudukan,Tugas pokok & Fungsi 2
1.3. Aspek Strategis & Permasalahan Utama 4
1.4. Landasan Hukum 6
1.5. Sistematika 7

BAB II PERENCANAAN KINERJA 9
2.1. Rencana Strategis 9
2.2. Perencanaan Kinerja 10
2.3. Perjanjian Kinerja 12
2.4. Instrumen Pendukung 13

BAB.III AKUNTABILITAS KINERJA 14
3.1. Capaian Kinerja Organisasi 14
3.2. Analisis Capaian Kinerja 15
3.3. Analisis Capaian Sasaran 19
3.4. Permasalahan dan Solusi 20
3.5. Realisasi Anggaran 20
3.6. Akuntabilitas Keuangan 23

BAB IV PENUTUP
4.1. Kesimpulan 24
4.2. Rencana tindak lanjut 24

LAMPIRAN
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Perjanjian Kinerja
Rencana Kerja Tahunan

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.3.1. : Aspek Strategis 4
Tabel 2.1 : Tujuan dan Sasaran 10
Tabel 2.2 : Perencanaan Kinerja 12
Tabel 2.3.1 : Perjanjian Kinerja 12
Tabel 2.3.2 : Program dan Anggaran 13
Tabel 3.1 : Capaian Kinerja Organisasi 14
Tabel 3.2.1 : Analisis Capaian Kinerja 15
Tabel 3.2.2 : Capaian Realisasi Kinerja 16
Tabel 3.2.3 : Capaian Kinerja IKU 17
Tabel 3.2.4 : Capaian analis keberhasilan/kegagalan 17
Tabel 3.2.5 : Capaian efisiensi Anggaran 18
Tabel 3.2.7 : Capaian nalisis program/kegiatan 18
Tabel 3.3 : Analisis Capaian Sasaran 19
Tabel 3.4.2 : Perbandingan capaian kinerja 19
Tabel 3.4.3 : Analisis capaian sasaran 19
Tabel 3.6.1 : Pagu dan Realisasi Anggaran 20
Tabel 3.6.3 : Perbandingan Realisasi Kinerja dan Anggaran 22

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kudus, bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencanan Kerja Tahunan 2021, Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Rencana Strategis 2018 – 2023 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 yang telah ditetapkan

Kudus, Februari 2022

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUDUS,

BUDI WALUYO, AP, MM
Pembina Tk.1
NIP. 19750207 199311 1 001

BAB I
Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan semangat reformasi dan otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama pola manajemennya. Sebagai dasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Setiap pelaksanaan urusan kepemerintahan akan selalu dikaitkan dengan, pengelolaan kepemerintahan yang baik (good governance) dengan tiga pilar utama yaitu, Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas. Asas Akuntabilitas merupakan salah satu azas dalam penyelenggaraan pemerintahan dimana azas tersebut memiliki konsekuensi bahwa setiap instansi pemerintah diharapkan mampu mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah (SAKIP). Subtansi dari SAKIP itu sendiri adalah menyelaraskan antara produk perencanaan dan realisasinya dengan berorientasi pada hasil (result oriented). Penyelarasan dilakukan mulai dengan penyusunan Rencana Stratejik dalam jangka menengah (5 tahun), Rencana Kerja Tahunan/ Penetapan Kinerja yang merupakan kontrak kerja serta laporan pertanggunjawaban setiap tahunnya.

LKjiP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan aturan pelaksanaan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Target kinerja yang harus dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018 – 2023 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong Instansi Pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang

berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LKj IP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing unit satuan kerja yang ada di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2011 dimaksud dinyatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus dipimpin oleh Kepala yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus sebagai salah satu unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah dibidang kebencanaan, telah berusaha untuk melakukan pembenahan diri sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sejalan dengan tujuan masyarakat terhadap terciptanya Good Governance. Dan sebagai perwujudan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, maka disusunlah Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021 yang akan mencerminkan hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1.2. Kedudukan, Tugas Pokok & Fungsi

1.2.1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus, adapun susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus terdiri dari:

1. Kepala;
2. Unsur Pengarah;

   Unsur Pengarah berasal dari lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana, pakar dan tokoh masyarakat, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

3. Unsur Pelaksana.

   Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.

   Susunan Organisasi Unsur Pelaksana, terdiri dari:

   a. Kepala Pelaksana;
   b. Sekretariat;
   c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
   d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
   e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
   f. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.2.2.Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas dari unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus adalah melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

adapun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Perumus kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang bencana;
c. Pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana daerah;
d. Pengkomandoan pelaksanaan penanggulangan bencana daerah;
e. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas kesekretariatan, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistic serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan bencana;
g. Pengelolaan Kesekretariatan Unsur Pelaksana;
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3. Aspek Strategis & Permasalahan Utama

1.3.1.Aspek Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2011 dimaksud dinyatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus dipimpin oleh Kepala yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Aspek strategis yang di jalankan meliputi:

1. Pra Bencana

   Tahap Pencegahan dan Mitigasi – Strategi yang ditempuh dengan mengupayakan penanganan preventif agar kerusakan dan korban jiwa dapat diminimalkan apabila terjadi bencana.

2. Saat Terjadi Bencana.

   Tahap Tanggap Darurat, Dilakukan upaya penyelamatan, pencarian dan evakuasi serta pemberian bantuan darurat berupa tempat penampungan sementara, bantuan logistik pangan dan penanganan medis bagi korban bencana.

3. Pasca Bencana.

   Tahap Rehabilitasi Dilakukan upaya perbaikan fisik dan non fisik serta memberdayakan dan mengembalikan harkat hidup terhadap korban bencana secara manusiawi.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus sampai akhir tahun 2021 didukung oleh Sumber Daya Manusia Jumlah seluruh pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus sebanyak 13 orang, Terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) 12 Orang, PHD sebanyak 1 Orang.

Adapun Secara umum data Pegawai di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus berdasarkan golongan dan eselon adalah sebagaimana tersebut dalam Tabel.

Tabel 1.3.1
Pegawai di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus
Berdasarkan Golongan dan Eselon

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Golongan				Eselon				
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	STAF
1.	PNS	12	-	7	4	1	-	-	2	1	9
2.	CPNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	PHD	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Jumlah	13	-	7	4	1	-	-	2	1	10

sedangkan data Pegawai di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagaimana tersebut pada Tabel 2

Tabel 2
Data Pegawai di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Status Kepegawaian	Jumlah	Pendidikan					
			SD	SLTP	SLTA	D-II	S-1	S-2
1.	PNS	12	-	1	5	1	2	3
2.	CPNS	0	-	-	-	-	-	-
3.	PHD	1	-	-	1	-	-	-
	Jumlah	13	-	1	6	1	2	3

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus

A. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus merupakan salah satu penunjang utama guna meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus pada saat ini antara lain berupa :

a. Penunjang kegiatan administrasi kantor
b. Penunjang kegiatan peningkatan kualitas SDM aparatur
c. Penunjang kegiatan pelaksanaaan petugas lapangan

B. Anggaran

Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus ditetapkan di tahun 2021 sebesar Rp. 4.147.947.440,- dijabarkan ke dalam 3 Program 8 Kegiatan dan 21 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran yang bersumber pada APBD Kabupaten Kudus,

1.3.2. Permasalahan Utama

Adapun Permasalahan utama (strategic issued) yang dihadapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus dalam menjalankan program dan kegiatan tahun anggaran 2021 dalam mencapai sasaran strategis adalah sebagai berikut :

a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan dini terhadap penanggulangan bencana walaupun hanya kecil.
b. Masih minimnya jumlah personil BPBD yang belum berpengalaman di bidangnya.
c. Realisasi pelaksanaan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana terlaksana di akhir tahun karena kondisi pandemic covid 19 yang melanda Indonesia khususnya Kabupaten Kudus.
d. Pengadaan bahan baku bangunan terkendala dengan tempat penampungan dan aturan yang tidak memperbolehkan menyetok barang.
e. Belanja bahan logistik di kurangi di kuwatirkan terlalu banyak tertimbun di gudang menjadi rusak/ expaed.

1.4 Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan LKj IP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 adalah:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Permenpan 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS;
4. Permenpan 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Permenpan 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 142);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 ;

9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomer 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2021;

1.5. Sistematika

Penulisan LKj IP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayaguaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan llmum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun Yang bersangkutan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasl untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasii pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capalan kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan rea-lisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Mernbandingkan realisasi kinerja sarnpai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Mernbandingkan realisasi kinerja ta1.un ini dengan standar nasional (iika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan reatisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk rnewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab.IV. Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas chpaian kinerja organisasi serta langkah di lnasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk rneningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

1) Perjanjian Kinerja
2) Iain-lain yang dianggap perlu

BAB II

Perencanaan Kinerja

2.1. Rencana Strategis

Berdasarkan Buku Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Lembaga Administrasi Negara yang di dalamnya mengatur tentang Perencanaan Stratejik maka ada beberapa pengertian visi, antara lain; visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Kedua, visi merupakan gambaran menantang tentang masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

a. Visi

Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan antar kondisi saat ini dengan masa depan yang ingin dicapai. Visi dan misi Perangkat Daerah harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah baik pada aspek kesejahteraan, layanan maupun peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan.

Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus yang merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 tahun yaitu 2018-2023. Dalam menghadapi tuntutan masyarakat serta perubahan-perubahan yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus dituntut harus mampu mengakomodasi kebutuhan berbagai pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) serta mampu mengantisipasi kondisi yang berkembang dan berubah setiap saat sehingga eksistensi organisasi dapat terjaga baik kredibilitas maupun akuntabilitasnya.

Berkaitan dengan hal tersebut maka visi Bupati Kudus Tahun 2018-2023 adalah :

Visi

"**KUDUS BANGKIT MENUJU KABUPATEN MODERN, RELIGIUS, CERDAS DAN SEJAHTERA**".

Misi

Guna mewujudkan visi tersebut terdapat Misi yang di dukung Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus yang harus dilaksanakan, yaitu: Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan sasaran	Target Kinerja pada Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan kualitas penanganan bencana		Prosentase desa tangguh bencana	79,71 %	80,72 %	81,72 %	82,72 %	83,73 %
		Berkurangnya resiko bencana yang terdampak pada masyarakat	Prosentase masyarakat yang teredukasi	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	68,23 Nilai	69,88 Nilai	71,54 Nilai	73,19 Nilai	74,84 Nilai

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus

2.2 Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif.

a. Tujuan

Perencanaan Kinerja dalam Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Perangkat Daerah bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat

Daerah yang efrisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanana masyarakat dapat dilakukan dengan baik termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistim menejemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

b. Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian sasaran. Di dalam mewujudkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus menempuh strategi sebagai berikut:

1. Membangun koordinasi dan kerjasama lintas Perangkat Daerah, lintas pemerintah, dan lintas stakeholder lainnya dalam melaksanakan kegiatan.
2. Meningkatkan kinerja, efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas aparatur.
3. Mengembangkan sistim pendataan/informasi data.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus.

c. Kebijakan

Di dalam mewujudkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus menempuh kebijakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan sehingga tersedia infrastruktur yang berkualitas dan partisipatif.
2. Melaksanakan dan mengikutsertakan aparat pada diklat dan bintek.
3. Melaksanakan sistim pendataan/informasi data secara periodik dan berkelanjutan.
4. Melaksanakan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus.

d. Program

Program kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus terdiri 3 Program antara lain :

1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2 Program Penanggulangan Bencana;
3 Program Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk perencanaan kinerja Tahun 2021 diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perencanaan Kinerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus
Tahun Anggaran 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan kualitas penanganan bencana		Prosentase desa tangguh bencana	%	69,47
		Berkurangnya resiko bencana yang terdampak pada masyarakat	Prosentase masyarakat teredukasi	%	66,67
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,50

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja atau dapat disebut dengan Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola kepada Bupati diuraikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.3.1
Perjanjian Kinerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus
Tahun Anggaran 2021

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Meningkatkan kualitas penanganan bencana	Prosentase desa tangguh bencana	%	69,47
Berkurangnya resiko bencana yang terdampak pada masyarakat	Prosentase masyarakat teredukasi	%	66,67
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,50

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus

Dari penilaian kinerja yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus pada tahun 2021 didapatkan nilai-nilai yang meliputi rencana tingkat capaian (target) dan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (target).

Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) dari 3 program terhadap satu kebijaksanaan yang dicanangkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus. Seiring dengan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan akan disesuaikan dengan kondisi baik dengan mengubah, menambah atau mengurangi kegiatan, target dan biaya melalui Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) dengan mengutamakan kegiatan yang mendesak dan harus dilaksanakan pada tahun 2021. Dalam Pelaksanaan untuk mencapai Sasaran Strategis yang diukur berdasarkan indikator Kinerja maka diperlukan anggaran. Dalam Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus mengajukan anggaran tahun 2021 sebesar Rp.4.147.947.440,- Pagu Anggaran tersebut digunakan untuk membiyai program sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.3.2
Program dan Anggaran
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp.)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	71,50 Nilai	2.585.492.776
2	Program Penanggulangan Bencana	Prosentase desa tangguh bencana	69,47	1.037.454.664
		Prosentase masyarakat teredukasi	66,67	
3	Program Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			525.000.000
		JUMLAH		**4.147.947.440**

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus

2.4. Instrumen Pendukung

Aplikasi atau Inovasi yang mendukung pencapaian kinerja di Tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah antara lain :

1. Sistem Informasi Pelayanan Melalui Pusdalops (Pusat Pengendalian operasi) dan Pusdatin (Pusat data informasi) terkait kebencanan di Kabupaten Kudus dengan calling 112;
2. Inovasi Pelayanan Masyarakat 247, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus melayani masyarakat selama 24 jam 7 hari tanpa libur.

BAB III
Akuntabilitas Kinerja

LKjIP merupakan wujud Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntanbilitas Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang aturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Revieu Atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021 dilakukan dengan cara sbb lihat tabel 3.1 :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

3.2. Analisis Capaian Kinerja

3.2.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 adalah untuk mengetahui apakah Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus pada tahun bersangkutan telah tercapai dan sesuai dengan target yang telah di rencanakan sebelumnya. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel Tersebut :

Tabel 3.2.1.
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
1	Meningkatkan kualitas penanganan bencana	Prosentase desa tangguh bencana	69,47	69,47	100	Sangat tinggi
2	Berkurangnya resiko bencana yang terdampak pada masyarakat	Prosentase masyarakat teredukasi	66,67	66,67	100	Sangat tinggi
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	71,50	71,50	80 *)	Sangat tinggi

Sumber Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 adalah sbb :

1. Persentase Prosentase desa tangguh bencana dari target 69,47% Realisasi 69,47% capaian indikator sasaran kinerja 100 % kategori penilaian Sangat Tinggi.
2. Persentase Prosentase masyarakat teredukasi dari target 66,67% Realisasi 66,67% capaian indikator sasaran kinerja 100 % kategori penilaian Sangat Tinggi.
3. Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dari target 85% Realisasi masih dalam proses.

Dari hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus tahun 2021 rata-rata : 100 %

3.2.2. Perbandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2021 dengan Dokumen Renstra (Rencana Strategis) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kudus dimaksudkan untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaiannya telah sesuai dengan perencanaan Jangka Menengah Pemerintah Daerah. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah dengan dapat dilaksanakannya seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja difokuskan pada pengukuran output dan outcome, sedangkan indikator benefit dan impact diukur sebatas apabila memungkinkan tersedia sumber datanya Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja dari instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus pada tahun 2021, termasuk kategori sangat berhasil.

Perbandingan antara Target, realisasi serta capaian Renstra Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 dapat tersaji pada tabel berikut

Tabel 3.2.2
Capaian realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2019			2020			2021		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatkan kualitas penanganan bencana	Prosentase desa tangguh bencana	33,33	33,33	100	50	50	100	66,67	66,67	100
2	Berkurangnya resiko bencana yang terdampak pada masyarakat	Prosentase masyarakat teredukasi	39	39	100	54,20	54,20	100	69,47	69,47	100
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	70,50	70,50	74,53	71,00	47,00	100	71,50	71,50	80,00

Sumber Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus telah berusaha sebaik mungkin melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana serta tugas pembantuan di Kabupaten Kudus, baik kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proporsional.

3.2.3. Perbandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2021 dengan Dokumen Renstra (Rencana Strategis) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus dimaksudkan untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaiannya telah sesuai dengan perencanaan Jangka Menengah Pemerintah Daerah. Perbandingan antara Target Akhir Renstra (tahun 2021) dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dapat tersaji pada tabel berikut :

Tabel.3.2.3.
Capaian Kinerjanya IKU dibandingkan dengan capaian Tahun sebelumnya dan terhadap Target RPJMD
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatkan kualitas penanganan bencana		Prosentase desa tangguh bencana	100%	66,67%	66,67
2		Berkurangnya resiko bencana yang terdampak pada masyarakat	Prosentase masyarakat teredukasi	100%	69,47%	69,47
3		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	85,00	80.00*)	100%

Sumber Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus

3.2.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Analisis Realisasi Kinerja dengan target tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus dimaksudkan untuk mengetahui pemyebab keberhasilan/kegagalan yang dicapai dapat tersaji pada tabel berikut :

Tabel.3.2.4.
Capaian Analisis Keberhasilan/Kegagalan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatkan kualitas penanganan bencana	Prosentase desa tangguh bencana	66,67	66,67	100	Berhasil	dipertahankan
2	Berkurangnya resiko bencana yang terdampak pada masyarakat	Prosentase masyarakat teredukasi	69,47	69,47	100	Berhasil	dipertahankan
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	71,50	71,50	80,00*)	Berhasil	dipertahankan

Sumber Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus

3.2.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya atas efisiensi Anggaran

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya atas efisiensi Anggaran tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus dimaksudkan untuk mengetahui hasil yang dicapai dapat tersaji pada tabel berikut :

Tabel.3.2.5.

REALISASI INDIKATOR DAN ANGGARAN PROGRAM
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2021

No Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja		Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja (dihitung dari bulan awal s/d akhir bulan triwulan)				Penanggungj awab	Persentase Capaian	Efisiensi
						Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	71,50	Nilai	2.585.492.776				2.324.957.580	Sekretaris	89.92%	10.08%
1.06	Program Penanggulangan Bencana	Prosentase desa tangguh bencana	69,47	%	1.037.454.664				874.443.298	Kasi PK dan KL dan RR	84,29%	15,71%
		Prosentase masyarakat teredukasi	66,67	%						Kasi PK		
	Program Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				525.000.000				396.963.200	Kasi KL dan RR	75,61%	24,39%

Keterangan Warna

Warna	Prosentase				Keterangan
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
	0 s/d 13	0 s/d 26	0 s/d 38	0 s/d 50	Sangat Rendah
	13.1 s/d 17	26.1 s/d 33	38.1 s/d 49	50.1 s/d 65	Rendah
	17.1 s/d 19	33.1 s/d 38	49.1 s/d 56	65.1 s/d 75	Sedang
	19.1 s/d 23	38.1 s/d 46	56.1 s/d 68	75.1 s/d 90	Tinggi
	23.1 lebih	46.1 lebih	68.1 lebih	90.1 lebih	Sangat Tinggi

(sumber : Permendagri 86 / 2017)

Sumber Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus

3.2.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

Analisis atas program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Anggaran tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus dimaksudkan untuk mengetahui hasil yang dicapai dapat tersaji pada tabel berikut :

Tabel.3.2.7.
Capaian Analisis program/kegiatan
yang menunjang keberhasilan/kegagalan tahun 2021

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak menunjang
1	Meningkatkan kualitas penanganan bencana	Prosentase desa tangguh bencana	66,67	Program Penanggulangan Bencana	Prosentase desa tangguh bencana	100	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak menunjang
2	Berkurangnya resiko bencana yang terdampak pada masyarakat	Prosentase masyarakat teredukasi	69,47		Prosentase masyarakat teredukasi	100	Menunjang
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	71,50	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	-	Menunjang

Sumber Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus

3.3. Analisis Capaian Sasaran

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus merupakan salah satu Perangkat Daerah yang berperan penting dalam penanggulangan bencana daerah.

Tabel 3.4.2
Perbandingan capaian Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran	Program	Kinerja		Anggaran	Anggaran
			Target %	Realisasi %	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan kualitas penanganan bencana	Program Penanggulangan Bencana	100	84,29	1.037.454.664	874.443.298
	Berkurangnya resiko bencana yang terdampak pada masyarakat					
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	89,92	2.585.492.776	2.324.957.580

Analisis capaian sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 dengan membandingkan hasil target, realisasi dan capaian sasaran Tahun 2021 diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4.3

Analisis Capaian Sasaran (PPS) Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator program	Target Tahun 2021 (%)	Realisasi Tahun 2021 (%)	Capaian Tahun 2021 (%)	Capaian Tahun Sebelum Nya (Tahun 2020)	Capaian Terhadap Target Renstra (Tahun 2021)
Meningkatkan kualitas penanganan bencana	Cakupan penanggulangan bencana	69,47	69,47	69,47	100	100
Berkurangnya resiko bencana yang terdampak pada masyarakat		66,67	66,67	66,67	100	100
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi SAKIP perangkat Daerah	80	80	80	0	0

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus

3.4. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 adalah sebagaimana berikut :

a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan dini terhadap penanggulangan bencana walaupun hanya kecil.
b. Masih minimnya jumlah personil BPBD yang belum berpengalaman di bidangnya.
c. Realisasi pelaksanaan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana terlaksana di akhir tahun karena kondisi pandemic covid 19 yang melanda Indonesia khususnya Kabupaten Kudus.
d. Pengadaan bahan baku bangunan terkendala dengan tempat penampungan dan aturan yang tidak memperbolehkan menyetok barang.
e. Belanja bahan logistik di kurangi di kuwatirkan terlalu banyak tertimbun di gudang menjadi rusak/ expaed.

3.5. Realisasi Anggaran

3.5.1. Pagu Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus, Pada tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus, mendapatkan Anggaran sebesar Rp. 4.147.947.440,- namun dalam realisasinya anggaran tersebut terserap sebanyak Rp. 3.596.364.078,- atau (86,70 %), sehingga terdapat efisiensi sebanyak 13,30%.

Tabel 3.6.1.
Pagu dan Realisasi Anggaran tahun 2021

NO	URAIAN	Pagu (Rp)	REALISASI(Rp)	%
1	*2*	*3*	*4*	*6*
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,585,492,776	2,324,957,580	89.92
1.	*Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*5,000,000*	*4,777,900*	*95.56*
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	*2,000,000*	1,984,000	99.20
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*3,000,000*	2,793,900	93.13
2.	*Administrasi Keuangan*	*1,818,558,000*	*1,668,645,025*	*91.76*
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	*1,695,686,000*	1,563,327,511	92.19
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*122,872,000*	105,317,514	85.71
3.	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*149,154,200*	*112,407,200*	*75.36*
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	12,665,000	12,665,000	100.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23,414,000	20,543,000	87.74
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5,982,000	5,982,000	100.00

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24,334,000	22,123,000	90.91
	Penyediaan barang cetak penggandaan	15,739,200	8,076,200	51.31
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	67,020,000	43,018,000	64.19
4.	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*375,582,576*	*331,825,955*	*88.35*
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,120,000	3,120,000	100.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	79,175,800	68,933,073	87.06
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33,095,000	20,655,000	62.41
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	260,191,776	239,117,882	91.90
5.	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*237,198,000*	*207,301,500*	*87.40*
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kedaraan Dinas Jabatan	98,901,000	86,241,700	87.20
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , pajak dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	133,370,000	117,151,800	87.84
	Pemelihaaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	4,927,000	3,908,000	79.32
II	Program Penanggulangan Bencana	1,037,454,664	874,443,298	84.29
1.	*Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana*	*757,412,664*	*665,857,298*	*87.91*
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	17,145,000	17,005,000	99.18
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	635,536,664	556,311,798	87.53
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	43,031,000	30,840,500	71.67
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	61,700,000	61,700,000	100.00
2.	*Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*	*280,042,000*	*208,586,000*	*74.48*
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	280,042,000	208,586,000	74.48
III.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	525,000,000	396,963,200	75.61
1.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi Bencana	525,000,000	396,963,200	75.61
		4,147,947,440	3,596,364,078	86.70

3.5.2. Belanja Operasi dan belanja Modal

Anggaran Kegiatan tahun 2021 OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus *Belanja Operasi* sebesar Rp. 4.136.932.440,- dan belanja modal sebesar Rp. 11.015.000,- yang bersumber pada APBD Kabupaten Kudus.

3.5.3. Efisiensi Anggaran

Efisiensi (daya guna) mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan Realisasi APBD dengan capaian kinerja.Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat melalui penyajian tabel di bawah ini :

Tabel 3.6.3

Efisiensi Anggaran Tahun 2021

NO	URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI(Rp)	SISA (Rp)	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,585,492,776	2,324,957,580	260,535,196	89.92
1.	*Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*5,000,000*	*4,777,900*	222,100	*95.56*
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	*2,000,000*	1,984,000	16,000	99.20
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*3,000,000*	2,793,900	206,100	93.13
2.	*Administrasi Keuangan*	*1,818,558,000*	*1,668,645,025*	149,912,975	*91.76*
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	*1,695,686,000*	1,563,327,511	132,358,489	92.19
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*122,872,000*	105,317,514	17,554,486	85.71
3.	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*149,154,200*	*112,407,200*	36,747,000	*75.36*
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	12,665,000	12,665,000	-	100.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23,414,000	20,543,000	2,871,000	87.74
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5,982,000	5,982,000	-	100.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24,334,000	22,123,000	2,211,000	90.91
	Penyediaan barang cetak penggandaan	15,739,200	8,076,200	7,663,000	51.31
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	67,020,000	43,018,000	24,002,000	64.19
4.	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*375,582,576*	*331,825,955*	43,756,621	*88.35*
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,120,000	3,120,000	-	100.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	79,175,800	68,933,073	10,242,727	87.06
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33,095,000	20,655,000	12,440,000	62.41
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	260,191,776	239,117,882	21,073,894	91.90
5.	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah*	*237,198,000*	*207,301,500*	29,896,500	*87.40*

	Daerah				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kedaraan Dinas Jabatan	98,901,000	86,241,700	12,659,300	87.20
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , pajak dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	133,370,000	117,151,800	16,218,200	87.84
	Pemelihaaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	4,927,000	3,908,000	1,019,000	79.32
II	Program Penanggulangan Bencana	1,037,454,664	874,443,298	163,011,366	84.29
1.	*Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana*	*757,412,664*	*665,857,298*	*91,555,366*	*87.91*
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	17,145,000	17,005,000	140,000	99.18
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	635,536,664	556,311,798	79,224,866	87.53
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	43,031,000	30,840,500	12,190,500	71.67
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	61,700,000	61,700,000	-	100.00
2.	*Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*	*280,042,000*	*208,586,000*	*71,456,000*	*74.48*
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	280,042,000	208,586,000	71,456,000	74.48
III.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	525,000,000	396,963,200	128,036,800	75.61
1.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi Bencana	525,000,000	396,963,200	128,036,800	75.61
		4,147,947,440	3,596,364,078	551,583,362	86.70

3.5.4. Prestasi atau Penghargaan

OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus untuk prestasi atau penghargaan nasional tidak ada.

3.6. Akuntabilitas Keuangan

Sumber dana kegiatan yang dianggarkan dan realisasinya serta sisa anggaran untuk mewujudkan pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus pada tahun 2021. Sumber data yang digunakan untuk mengukur output adalah laporan kegiatan yang disampaikan oleh Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

BAB IV
Penutup

A. Kesimpulan

Dari analisis dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus tahun 2021 dapat dikatakan sangat berhasil walaupun masih banyak kendala/hambatan dalam pelaksanaannya.

Namun demikian, dalam pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang perlu lebih ditingkatkan lagi, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik sesuai program yang telah ditetapkan.

Adapun permasalahan dan solusi yang dapat menghambat kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus diantaranya :

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan dini terhadap penanggulangan bencana walaupun hanya kecil.
2. Masih minimnya jumlah personil BPBD yang belum berpengalaman di bidangnya.
3. Realisasi pelaksanaan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana terlaksana di akhir tahun karena kondisi pandemic covid 19 yang melanda Indonesia khususnya Kabupaten Kudus.
4. Pengadaan bahan baku bangunan terkendala dengan tempat penampungan dan aturan yang tidak memperbolehkan menyetok barang.
5. Belanja bahan logistik di kurangi di kuwatirkan terlalu banyak tertimbun di gudang menjadi rusak/ expaed.

B. Rencana Tindak Lanjut

Guna mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul di masa yang akan datang, maka beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh BPBD Kabupaten Kudus, diantaranya :

1. Mewujudkan peningkatan kemampuan SDM (Aparatur dan Masyarakat) yang menguasai teknologi di bidang penanggulangan bencana.
2. Mewujudkan standar, kebutuhan dan prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana.
3. Mewujudkan pemanfaatan teknologi pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi untuk menghadapi ancaman dan resiko bencana.

4. Mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
5. Penanganan pengungsi secara adil (sesuai standar pelayanan minimum) serta melaksanakan pemulihan kondisi dari dampak bencana.
6. Mengembangkan dan meningkatkan kemitraan dengan masyarakat di bidang penanggulangan bencana khususnya tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana.

Kudus, Februari 2022

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUDUS,

BUDI WALUYO, AP, MM
Pembina Tk.1
NIP. 19750207 199311 1 001